



**PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA WARALABA ATAS
TINDAKAN WANPRESTASI PEMBERI WARALABA DALAM
PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA (Studi Kasus
Putusan Nomor 1064K/Pdt/2020)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan Program Studi
Magister Kenotariatan

Disusun Oleh :

Ahmad Azizul Alim, S.H.
NPM. 231003741020677

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2025**



**PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA WARALABA ATAS
TINDAKAN WANPRESTASI PEMBERI WARALABA DALAM
PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA (Studi Kasus
Putusan Nomor 1064K/Pdt/2020)”**

TESIS

Disusun :

**Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Pembimbing,

Dr. Aniek Tyaswati Wiji Lestari, S.H., M.Hum.
NUPTK. 4534740641230083

Peneliti,

Ahmad Azizul Alim, S.H.
NPM. 231003741020677

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**

Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.
NUPTK. 3241741642230113

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

2025



**PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA WARALABA ATAS
TINDAKAN WANPRESTASI PEMBERI WARALABA DALAM
PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA (Studi Kasus
Putusan Nomor 1064K/Pdt/2020)**

TESIS

**Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Penguji pada tanggal 02-09-2025
dan disahkan Pada Tanggal : 01-10-2025**

Penguji I

Dr. Aniek Tyaswati Wiji Lestari, S.H., M.Hum.
NUPTK. 4534740641230083

Penguji II

Prof. Dr. Sri Mulyani, S.H., M.Hum.
NUPTK. 9246744645230083

Penguji III

Dr. Sri Retno Widyorini, S.H., M.Hum.
NUPTK. 2260741642230063

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**



Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.
NUPTK. 3241741642230113

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan membaca dan mencermati Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, yang bertanda tangan di bawah ini, Saya mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang:

Nama : Ahmad Azizul Alim, S.H.

NPM : 231003741020677

Alamat : Jl. Elang 5, RT.3 RW. 5, Desa Gajah, Kec. Gajah, Kab. Demak

Dengan ini menyatakan:

1. Tesis saya adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri;
2. Tesis saya tidak ada sedikitpun plagiat dari karya ilmiah orang lain;
3. Tesis saya dibuat dengan metode ilmiah yang lazim.

Demikian pernyataan ini, apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menanggalkan gelar “Magister” yang sudah saya terima.

Semarang, 01 Oktober 2025

Yang menyatakan,



Ahmad Azizul Alim, S.H.

NPM. 231003741020677

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA WARALABA ATAS TINDAKAN WANPRESTASI PEMBERI WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 1064K/Pdt/2020)” yang merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Selama proses penyusunan tesis ini segala hambatan dan rintangan ini dapat Penulis jalani berkat doa, bantuan, dan bimbingan, dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak yang setulus-tulusnya kepada:

1. **Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si.** selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
2. **Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
3. **Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.** selaku Kepala Program studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dan selaku Dosen Pembimbing Tesis yang selalu sabar, pengertian, dan selalu memberikan saran serta masukan dengan penuh kasih sayang, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;

4. **Dr. Purwanto. S.H., M.Si.** Selaku Sekretaris Prodi Bidang Akademik, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
5. **Dr. Aniek Tyaswati Wiji Lestari, S.H., M. Hum.** Selaku Sekretaris Prodi Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Program Studi magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang,
6. **Bapak/Ibu Dosen Pengajar** yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi Penulis.
7. Bapak **Sukardi** dan Ibu **Suci Asmawarti** yang tidak pernah berhenti mendoakan dan selalu memberi motivasi dan donatur kepada Penulis untuk segera menyelesaikan studi Magister Kenotariatan;
8. **Tiara Eldawati**, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi untuk segera menyelesaikan studi Magister Kenotariatan;
9. Rekan-rekan dan Kolega Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 angkatan XXIII yang bersama-sama melewati suka dan duka selama masa studi berlangsung;
10. Semua pihak yang telah memberikan dukungan selama pengerjaan penulisan tesis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 01 Oktober 2025

Ahmad Azizul Alim, S.H
NPM. 231003741020677

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi penerima waralaba dalam perjanjian waralaba di Indonesia dengan fokus analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1064K/Pdt/2020. Latar belakang penelitian berangkat dari fenomena meningkatnya bisnis waralaba yang sering menimbulkan sengketa akibat wanprestasi, baik dari pihak *franchisor* maupun *franchisee*. Permasalahan yang dikaji meliputi bentuk perlindungan hukum bagi penerima waralaba, pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi, serta akibat hukum yang timbul dari wanprestasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi penerima waralaba meliputi perlindungan preventif melalui pengaturan dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan, serta perlindungan represif melalui penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam putusan yang dianalisis, Mahkamah Agung menolak pembelaan franchisee berdasarkan asas *exceptio non adimpleti contractus* karena wanprestasi franchisor dianggap parsial dan tidak substansial, sedangkan wanprestasi franchisee bersifat total dan mendasar. Akibat hukumnya, franchisee diwajibkan membayar ganti rugi dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan asas proporsionalitas sangat penting dalam menilai wanprestasi dalam perjanjian waralaba. Disarankan agar pihak penerima waralaba lebih cermat dalam menyusun perjanjian dan memahami hak serta kewajiban masing-masing untuk meminimalkan risiko sengketa.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Waralaba, Wanprestasi, Putusan Mahkamah Agung, Perjanjian

ABSTRACT

This study examines the legal protection for franchisees in franchise agreements in Indonesia, with a focus on the Supreme Court Decision Nomor 1064K/Pdt/2020. The background of the research stems from the growing phenomenon of franchise businesses, which often lead to disputes due to breaches of contract (wanprestasi) by either franchisors or franchisees. The issues discussed include the forms of legal protection available to franchisees, the court's considerations in deciding breach of contract cases, and the legal consequences arising from such breaches. The research adopts a normative juridical method with a descriptive-analytical specification. Data were obtained through literature study using primary, secondary, and tertiary legal materials, and analyzed qualitatively. The results show that legal protection for franchisees includes preventive protection through contractual arrangements and statutory regulations, as well as repressive protection through dispute resolution in court. In the analyzed decision, the Supreme Court rejected the franchisee's defense based on the principle of exceptio non adimpleti contractus, as the franchisor's breach was considered partial and insubstantial, while the franchisee's breach was total and fundamental. The legal consequence was that the franchisee was ordered to pay compensation and fulfill the obligations stipulated in the agreement. This study concludes that the application of the principle of proportionality is crucial in assessing breaches of contract in franchise agreements. It is recommended that franchisees exercise greater caution in drafting agreements and have a clear understanding of their rights and obligations to minimize the risk of disputes.

Keywords: *Legal protection, Franchise, Breach of contract, Supreme Court decision, Agreement*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	12
E. METODE PENELITIAN.....	12
1. Metode Pendekatan	12
2. Spesifikasi Penelitian	13
3. Sumber dan Jenis Data	13
a. Bahan hukum primer.....	13
b. Bahan hukum sekunder.....	14
4. Metode Pengumpulan Data.....	15
5. Metode Penyajian Data	15
6. Metode Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	17

1. Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian.....	17
2. Asas-asas Hukum Perjanjian.....	21
3. Jenis-jenis Perjanjian.....	24
4. Wanprestasi.....	26
B. Tinjauan Khusus Tentang Perjanjian Waralaba.....	28
1. Peran Notaris.....	29
2. Pengertian dan Dasar Hukum Waralaba (<i>Franchise</i>).....	33
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba.....	37
4. Syarat-syarat Pembuatan Perjanjian Waralaba.....	40
5. Perjanjian Waralaba dalam Hukum Positif.....	42
6. Perlindungan Hukum.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
1. Perlindungan hukum bagi penerima waralaba dalam perjanjian..... di Indonesia.....	48
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan atas tindakan wanprestasi dalam perjanjian waralaba(putusan Nomor 1064K/Pdt/2020).....	61
3. Akibat hukum atas tindakan wanprestasi dalam perjanjian waralaba (putusan Nomor 1064K/Pdt/2020).....	87
BAB IV PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	